

Analisis *Security Dilemma* dalam Hubungan Diplomasi Australia-Israel Pasca Pengesahan RUU *Combating Antisemitism, Hat and Extremism Act* 2026

Raden Muhammad Naufal Athallah¹, Muhammad Rafly Sehan², Rahel Riyanto³, Aysya Rachsyanda⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sriwijaya, Indonesia

Korespondensi: 07041382328189@student.unsri.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 12th, 2026

Direvisi Mei 17th, 2026

Diterima Mei 19th, 2026

Kata kunci:

Ekstremisme transnasional, dilemma keamanan, kebijakan domestik, kebijakan imigrasi, antisemitism Australia, hubungan internasional, Israel.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transformasi kebijakan keamanan Pemerintah Australia pasca tragedi teror Bondi Beach pada Desember 2025 dalam merespons ancaman ekstremisme transnasional dan imported conflict. Fokus utama studi ini adalah pengesahan *Combating Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026*, khususnya pada amandemen hukum imigrasi melalui Schedule 2 yang memberikan wewenang diskresi luas kepada negara untuk menyaring aktor asing berdasarkan pertimbangan ideologis demi melindungi kohesi sosial masyarakat. Mengingat populasi Yahudi Australia yang mencapai estimasi 116.967 jiwa (0,46% dari total populasi), kebijakan ini dimaksudkan sebagai perlindungan domestik namun justru memicu ketegangan internasional yang signifikan. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis *security dilemma*, penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan imigrasi berbasis keamanan domestik Australia tersebut dipersepsikan sebagai ancaman politik oleh Israel, terutama terkait potensi penolakan visa terhadap menteri kabinet seperti Itamar Ben-Gvir. Ketidaksesuaian persepsi ini memicu spiral ketegangan berupa tindakan balasan (*tit-for-tat*) diplomatik dan retorika keras dari Benjamin Netanyahu, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan bilateral dan keamanan kolektif antar kedua negara sekutu.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Keamanan global mengalami transformasi yang cukup pesat pada era globalisasi modern ini, dengan naiknya fenomena violent extremism yang bersifat transnasional atau lintas batas negara (Shelvvia Arnie Putri et al., 2024). Selain mempercepat arus barang dan jasa, perkembangan globalisasi juga mempercepat proses penyebaran pandangan ekstrem pemicu konflik dan kekerasan. Kelompok ekstremis maupun individu menyebarkan narasi, propaganda, dan mobilisasi dengan efektif melalui teknologi digital, media sosial dan jaringan komunikasi global yang kemudian melampaui batas-batas teritorial negara, membuat perluasan jangkauan pengaruh mereka semakin efektif (Khalil, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan modern telah berubah menjadi ancaman yang tidak konvensional dan tidak terlokalisasi. Sebaliknya, mereka telah berkembang menjadi ancaman yang tidak konvensional, kompleks, dan multidimensional. *Violent extremism* mengancam keamanan fisik dan stabilitas sosial. Ini juga mengancam legitimasi negara dan kohesi masyarakat. Dalam hal ini, ekstremisme menjadi masalah besar bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara yang menganut demokrasi yang sangat mempertahankan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. (Varela et al., 2025)

Globalisasi juga melihatkan fenomena *imported conflict*, yaitu kondisi di mana konflik yang terjadi di suatu wilayah dapat ditransfer ke wilayah lain melalui diaspora, identitas -transnasional, dan juga solidaritas ideologis. Hal ini memperlihatkan bahwa batas antara konflik domestik dan internasional menjadi semakin samar. Konflik yang awalnya bersifat eksternal dapat dengan mudah memengaruhi dinamika internal suatu negara, sehingga menciptakan kelemahan baru dalam sistem keamanan nasional. Dalam konteks ini, negara tidak hanya menghadapi ancaman dari aktor domestik, tetapi juga dari dinamika global yang sulit dikendalikan secara langsung (Alrasheed et al., 2025). Negara-negara demokrasi menghadapi dilema yang fundamental dalam merespons ancaman

ekstremisme. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan nasional dan keselamatan warganya melalui berbagai kebijakan dan instrumen keamanan. Namun di sisi lain, kebijakan yang terlalu menekan berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketegangan antara kebutuhan akan keamanan dan komitmen terhadap kebebasan merupakan hal yang sering kali sulit untuk diseimbangkan (Khalil, 2025).

Respon sebuah negara terhadap ancaman ekstremisme melalui pendekatan keamanan yang lebih ketat, seperti peningkatan pengawasan, kontrol terhadap arus migrasi, serta pembatasan terhadap individu atau kelompok tertentu yang dianggap berpotensi membawa ideologi ekstrem. Namun, pendekatan ini tidak selalu bersifat netral dan sering kali menimbulkan implikasi politik yang lebih luas. Kebijakan keamanan yang bersifat selektif atau diskriminatif dapat memicu ketegangan sosial di dalam negeri, serta menimbulkan persepsi negatif dari negara lain dalam konteks hubungan internasional (Booth & Wheeler, 2008). Kebijakan keamanan domestik juga memiliki dampak eksternal yang signifikan. Dalam sistem internasional yang saling terhubung, tindakan suatu negara dalam memperkuat keamanannya dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Persoalan domestik dapat berpengaruh juga dan berkaitan erat dengan dinamika hubungan internasional (Shapiro & Suzan, 2003).

Respons terhadap ekstremisme tidak hanya memengaruhi stabilitas internal suatu negara, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan diplomatik dan keseimbangan. Dalam konteks meningkatnya ancaman ekstremisme global tersebut, tragedi penembakan yang terjadi dalam acara *Chanukah by the Sea* di Bondi Beach, Sydney pada Desember 2025 menjadi salah satu insiden ini yang menimbulkan korban jiwa, dan menciptakan dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat Australia, termasuk rasa takut, ketidakpercayaan, serta meningkatnya sensitivitas terhadap isu-isu keamanan dan identitas secara nasional. Peristiwa ini dapat dijadikan reaksi dari fenomena *imported conflict*, artinya di mana ketegangan geopolitik global, khususnya yang berkaitan dengan isu identitas, agama, dan konflik internasional, turut memengaruhi stabilitas domestik suatu negara. Dalam hal ini, tragedi Bondi Beach merupakan tindakan kriminal sekaligus juga terdapat keterkaitan antara hubungan kondisi internal suatu negara dan efeknya terhadap kondisi diplomatik (Preventing Violent Extremism through Education: Effective Activities and Impact Policy Brief, 2018). Hal ini memperkuat argumen bahwa ancaman keamanan modern bersifat lintas batas dan tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka domestik saja.

Dampak dari tragedi ini dapat dikatakan bersifat multidimensional yang artinya luas. Secara sosial, insiden tersebut memicu meningkatnya ketegangan antar kelompok masyarakat, terutama yang berkaitan dengan identitas agama dan etnis. Hal ini berpotensi mengganggu sistem sosial serta menciptakan polarisasi di dalam masyarakat. Secara politik, peristiwa ini menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap pemerintah Australia untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam menjamin keamanan nasional. Tekanan publik yang tinggi mendorong negara untuk menunjukkan kapasitasnya dalam melindungi warga negara dari ancaman yang dianggap semakin nyata dan mendesak.

Secara domestik, kebijakan yang lebih ketat dapat meningkatkan rasa aman masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan kritik terkait diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, dalam konteks internasional, kebijakan tersebut dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang bersifat politis atau bahkan ofensif oleh negara lain, terutama jika menyangkut individu atau aktor yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan atau masyarakat negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan domestik memiliki konsekuensi yang melampaui batas negara dan dapat memengaruhi dinamika hubungan internasional. Tragedi Bondi Beach juga melihat bagaimana respons negara terhadap ancaman keamanan dapat menciptakan efek domino dalam sistem internasional. Upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat memicu reaksi dari negara lain yang merasa dirugikan atau terancam, sehingga menciptakan ketegangan baru dalam hubungan bilateral. Dalam konteks ini, keamanan tidak lagi bersifat absolut, melainkan relatif dan saling bergantung pada persepsi serta tindakan negara lain (McDonald, 2005).

Kebijakan keamanan domestik memiliki konsekuensi yang melampaui batas negara dan dapat memengaruhi dinamika hubungan internasional. Tragedi Bondi Beach ini terespons negara terhadap ancaman keamanan dapat menciptakan efek domino dalam sistem internasional. Upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat memicu reaksi dari negara lain yang merasa dirugikan atau terancam, sehingga menciptakan ketegangan baru dalam hubungan bilateral (Renan, 2012). Dalam

konteks ini, keamanan tidak lagi bersifat absolut, melainkan relatif dan saling bergantung pada persepsi serta tindakan negara lain.

Menanggapi tekanan publik dan urgensi pemulihan keamanan, Perdana Menteri Anthony Albanese melalui pidato politiknya pasca kejadian, menaikkan status ekstremisme menjadi ancaman darurat nasional. Pada Januari 2026, Pemerintah Australia mengambil langkah tegas dengan mengesahkan *Combating Antisemitism, Hate and Extremism Bill 2026*. Salah satu komponen paling krusial dalam undang-undang ini adalah *Schedule 2 (Migration Laws)*, yang memperkuat kontrol terhadap aktor asing melalui penyaringan visa berbasis pertimbangan ideologis. Langkah ini menandai pergeseran strategi keamanan Australia dari pendekatan reaktif menjadi preventif di wilayah perbatasan. Salah satu bentuk aksi dari Pemerintah Australia *Combating Antisemitism, Hate Extremism Bill 2026*, yang secara khusus memperkuat kerangka hukum dalam menangani ancaman berbasis ideologi.

Dalam rancangan kebijakan ini kebijakan *Schedule 2* yang berisikan undang – undang aspek migrasi dan kontrol terhadap aktor asing menjadi sorotan utama, khususnya melalui ketentuan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada otoritas negara untuk menilai dan membatasi masuknya individu berdasarkan pertimbangan ideologis maupun rekam jejak tertentu (McGarry, 2026). Isinya kurang lebih memberikan penjelasan bagaimana kebijakan ini berfungsi untuk memperluas otoritas Menteri Imigrasi untuk menyaring, menolak, atau membatalkan visa individu berdasarkan penilaian ideologi dan potensi gangguan terhadap kohesi sosial. Output dari kebijakan ini ialah visa diwajibkan menjadi izin administrative dan menjadi persyaratan resmi untuk menangkal potensi ancaman sebelum masuk ke wilayah kedaulatan Australia. Kebijakan ini juga berfokus pada detail kebijakan imigrasi berdasarkan ideologi radikal, rasisme dan anti semit. Kebijakan yang berfokus pada kontrol ideologis ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai konsekuensi yang lebih luas. Isu keamanan modern bukan saja berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga mencakup sosial dan politik, termasuk hate crime, ekstremisme, dan identitas kelompok. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *security dilemma* untuk menganalisis bagaimana kebijakan keamanan domestik Australia menghasilkan implikasi terhadap persepsi keamanan, legitimasi politik, dan hubungan bilateral Australia–Israel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana suatu kebijakan domestik dapat memiliki implikasi dalam dinamika keamanan internasional. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus kebijakan *Combating Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026* di Australia, dengan cara ini, penulis dapat menganalisis kebijakan tersebut dari kebijakan internal suatu negara dapat ditafsirkan berpengaruh terhadap kondisi luar negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam hubungan antara kebijakan, persepsi ancaman, dan interaksi antarnegara dalam konteks yang kompleks.

Analisis Konsep yang diperkenalkan oleh Barry Buzan ialah analisis yang dapat dimasukan ke dalam konsep *Security Dilemma*, konsep ini menjelaskan bahwa tindakan negara untuk meningkatkan keamanan nasional sering dipersepsikan sebagai ancaman oleh aktor lain (Buzan et al., 1998), sehingga mendorong respon defensif maupun ofensif yang dapat meningkatkan ketegangan internasional yang menjelaskan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis tidak adanya otoritas tertinggi menyebabkan negara selalu dalam kondisi tidak pasti terhadap niat negara lain (Booth & Wheeler, 2008). Dalam kondisi tersebut, kebijakan yang dasarnya bersifat defensif dapat dipersepsikan oleh pihak lain sebagai hal yang berbeda, sehingga menciptakan spiral ketidakpercayaan.

Security dilemma muncul dikarenakan negara sulit membedakan tindakan ofensif dan defensif. Ketika suatu negara meningkatkan kapasitas keamanan melalui regulasi, penguatan intelijen, atau kerja sama pertahanan, negara lain dapat melihat tersebut sebagai indikasi ancaman. Dalam konteks penelitian ini, penguatan regulasi melalui *combating Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026* oleh pemerintah Australia merupakan bentuk respon terhadap meningkatnya ancaman ekstremisme dan antisemitisme di dalam negeri (Prime Minister of Australia, 2025). Pengesahan kebijakan ini memiliki implikasi di domestik, dan juga antar negara yang berpotensi mempengaruhi hubungan luar negeri Australia contohnya keterkaitan penembakan kaum yahudi ini dengan negara yang meyoritasnya merupakan tempat tinggal kaum suku tersebut, spesifik nya dengan Israel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RUU *Combatting Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026* Australia

Terorisme merupakan sebuah ancaman eksistensial yang tidak hanya menyerang nyawa manusia, namun juga menargetkan kohesi sosial dan nilai-nilai demokrasi suatu bangsa melalui penyebaran rasa takut yang sistematis. Peristiwa penembakan massal yang terjadi pada Minggu, 14 Desember 2025, menjadi kejadian sangat nyata dari ancaman tersebut ketika dua orang pelaku, Sajid dan Naveed Akram, melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah kerumunan warga. Lokasi akurat penembakan ini berada di Archer Park, Bondi Beach, Sydney, tepat saat komunitas sedang menyelenggarakan festival keagamaan "Chanukah by the Sea".

Alur serangan bermula ketika pelaku memarkirkan kendaraan di jembatan penyeberangan Campbell Parade, membentangkan simbol ekstremis, dan memulai serangan dengan lemparan bom rakitan sebelum akhirnya melepaskan tembakan beruntun dari posisi ketinggian dan jarak dekat. Hasil dari aksi keji ini sangat memilukan, tercatat 15 orang kehilangan nyawa, termasuk anak-anak dan tokoh agama, serta puluhan lainnya mengalami luka berat yang mengubah hidup mereka selamanya. Merespons guncangan hebat tersebut, pemerintah Australia segera mengambil langkah luar biasa ketika isu ini mulai hangat dan menjadi tuntutan nasional pada akhir Desember 2025. Proses pembuatan undang-undang ini diusulkan secara resmi oleh Jaksa Agung (Attorney-General) Michelle Rowland, yang kemudian berujung pada pemanggilan kembali (recall) anggota Parlemen pada Januari 2026 untuk membahas langkah darurat

Draft RUU *Combatting Antisemitism, Hate and Extremism Bill 2026* pun disusun dengan isi yang sangat ketat. Berdasarkan draf tersebut, Schedule 1 mengatur amandemen hukum pidana yang memperberat hukuman bagi pemimpin kelompok yang menghasut kebencian hingga 12 tahun penjara serta melarang simbol-simbol ekstremis. Sementara itu, Draft Schedule 2 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membatalkan visa non-warga negara yang menyebarkan ideologi kebencian, rasisme, dan antisemite. Dalam konteks ini, Undang – Undang ini dapat membuat sebuah tokoh yang terafiliasi oleh komunitas yang dianggap rasisme, dapat dipenjarakan. Salah satunya En-Gvir dikenal sebagai pemimpin partai sayap kanan jauh, Otzma Yehudit. Ia memiliki rekam jejak panjang terkait retorika yang dianggap rasis, anti-Arab, dan ultra-nasionalis. Pemerintah Australia memandang kehadirannya atau pengaruh ideologinya sebagai ancaman langsung terhadap "kohesi sosial" di Australia. Berdasarkan Schedule 2, visa Ben-Gvir atau tokoh-tokoh Yahudi yang berafiliasi erat dengannya ditolak/dibatalkan karena dianggap dapat "mengimpor" konflik Timur Tengah ke dalam Australia.

Hubungan Diplomatik Australia – Israel

Hubungan diplomatik antara Australia dan Israel dimulai ketika Australia menjadi negara pertama yang memberikan suara mendukung rencana pembagian wilayah PBB pada tahun 1947. Secara resmi, hubungan ini dikukuhkan pada 29 Januari 1949, di bawah pemerintahan Partai Buruh pimpinan Ben Chifley, dengan peran signifikan Menteri Luar Negeri H.V. Evatt yang menjabat sebagai Presiden Majelis Umum PBB saat Israel diterima sebagai anggota (Łapaj-Kucharska, 2023). Selama dekade 1950-an hingga 1960-an, hubungan kedua negara dicirikan oleh dukungan bipartisan yang kuat dari pemerintah Australia, baik di bawah koalisi Liberal-Nasional pimpinan Robert Menzies maupun Partai Buruh. Australia memandang Israel sebagai sesama negara demokrasi yang lahir dari aspirasi pasca-Perang Dunia II, sehingga dukungan diplomatik di forum internasional cenderung bersifat konsisten dan tanpa syarat. Dinamika Era 1980-an hingga 1990-an: Ujian Pragmatisme dan Geopolitik Memasuki era 1980-an dan 1990-an, hubungan ini mulai mengalami dinamika yang lebih kompleks akibat perubahan peta politik Timur Tengah dan kepentingan ekonomi Australia. Meskipun dukungan terhadap hak eksistensi Israel tetap tak tergoyahkan, Australia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dalam menanggapi aspirasi rakyat Palestina. Pada masa pemerintahan Bob Hawke dan Paul Keating, Australia tetap menjadi sekutu dekat Israel, namun mulai kritis terhadap kebijakan permukiman di wilayah pendudukan. Pada periode ini, kerja sama intelijen dan militer mulai berkembang secara tertutup, sementara di sektor publik, Australia sering kali mencoba berperan sebagai "teman yang jujur" (honest friend) yang mendukung solusi dua negara.

Keamanan nasional Australia secara intrinsik terkait dengan perlindungan terhadap keberagaman demografinya, khususnya komunitas Yahudi yang memiliki ikatan emosional kuat dengan Israel. Berdasarkan laporan Jewish Population of Australia 2021 Census Findings Report,

terdapat 99.956 jiwa warga Yahudi yang terhitung secara langsung (*enumerated*), namun jika memperhitungkan faktor undercount, angka estimasi mencapai 116.967 jiwa. Dengan proporsi 0,46% dari total populasi nasional, konsentrasi komunitas ini di wilayah strategis seperti Sydney dan Melbourne. Dalam perspektif Security Dilemma, perlindungan terhadap populasi ini menjadi alasan pembenar bagi Australia untuk memperkuat keamanan secara domestiknya melalui RUU *Combatting Antisemitism, Hate and Extremism Bill 2026* 2026, yang secara tidak sengaja memicu persepsi ancaman bagi pihak eksternal ter khususnya Israel yang merupakan mayoritas orang Yahudi. Sebagai respons terhadap trauma nasional tersebut, pemerintah Australia menerapkan Schedule 2 dalam *Combatting Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026*. Kebijakan ini menjadi alat penyaring ideologi yang menyasar tokoh-tokoh yang dianggap ekstrem, termasuk Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Penolakan visa terhadap Ben-Gvir didasarkan pada kekhawatiran bahwa retorika ultra-nasionalisnya dapat "mengimpor" konflik Timur Tengah ke jalanan Australia dan mengancam keselamatan warga Yahudi setempat. Di sinilah terjadi indikator Salah Persepsi Niat (*Misperception of Intent*), yakni Australia memandang langkah ini sebagai tindakan defensif administratif, sementara PM Benjamin Netanyahu membacanya sebagai serangan ofensif terhadap kedaulatan politik dan penghinaan terhadap anggota kabinet resmi Israel.

Pertumbuhan komunitas Yahudi di Australia juga menjadi faktor domestik yang memperkuat lobi dan jaringan budaya antara kedua negara, menjaga agar hubungan tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap isu-isu Arab-Israel. Kerja sama keamanan semakin erat pasca-serangan 11 September, di mana kedua negara berbagi kepentingan yang sama dalam melawan terorisme global. Memasuki pertengahan hingga akhir 2000-an, hubungan ini ditandai dengan peningkatan volume perdagangan dan kolaborasi teknologi tinggi. Namun, era ini juga mencatat beberapa gesekan diplomatik, seperti insiden penggunaan paspor Australia oleh agen intelijen dalam operasi di luar negeri, yang sempat memicu pengusiran diplomat. Australia sering dipandang sebagai salah satu negara Barat yang memiliki kedekatan politik dengan Israel, terutama dalam isu keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Kedekatan tersebut membuat hubungan kedua negara relatif stabil.

Pengesahan *Combatting Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026* sebagai respons atas Tragedi Bondi Beach 2025 menciptakan dilema keamanan bagi Australia. Meski bertujuan memperkuat stabilitas domestik dan hubungan bilateral dengan Israel, kebijakan defensif ini berisiko dipersepsikan sebagai langkah politis yang diskriminatif dan mengancam kebebasan sipil. Akhirnya, Australia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan perlindungan nasional dengan sensitivitas diplomatik guna menghindari ketegangan internasional di era ancaman transnasional. Penerapan Schedule 2 dalam regulasi baru ini menandai pergeseran fungsi visa dari sekadar izin administratif menjadi instrumen pertahanan ideologi yang agresif. Melalui otoritas absolut Menteri Imigrasi, Australia kini dapat membatalkan atau menolak visa bagi individu yang dianggap memiliki "karakter buruk" atau berpotensi merusak kohesi sosial pasca-Tragedi Bondi. Hukum ini kemudian menjadi titik picu utama gesekan diplomatik dengan Israel, di mana prosedur migrasi berubah menjadi pernyataan politik yang menyasar kedaulatan warga negara sekutu. Penolakan terhadap Ben-Gvir inilah yang membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meradang. Netanyahu memandang langkah Australia merupakan serangan terhadap anggota kabinet resminya dan penghinaan terhadap kedaulatan politik Israel. Kemarahan Israel terhadap Australia muncul sebagai respons langsung atas kebijakan yang dianggap subjektif tersebut. Israel secara terbuka melontarkan kritik keras, bahkan mengecam Perdana Menteri Anthony Albanese karena dianggap tidak tegas dalam menangani ancaman radikalisme domestik dan justru menyasar tokoh-tokoh mereka melalui penyaringan visa. Sebagai bentuk protes sekaligus unjuk posisi, Israel menawarkan pelatihan bagi kepolisian senior Australia—sebuah gestur diplomasi yang merendahkan sekaligus menegaskan bahwa Australia gagal mengelola keamanan nasionalnya. Di sinilah *Security Dilemma* terjadi, niat Australia untuk memproteksi negara dari "konflik impor" justru memicu tindakan balasan (*tit-for-tat*) yang merusak stabilitas hubungan bilateral kedua negara.

Reaksi Israel

Reaksi Israel terhadap pengesahan *Combatting Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026* oleh Pemerintah Australia muncul karena kebijakan tersebut dipandang tidak lagi hanya berada dalam ranah keamanan domestik, melainkan telah memasuki wilayah politik internasional yang sensitif. Pasca

tragedi Bondi Beach 2025, Australia menghadapi tekanan publik yang sangat besar untuk memperkuat sistem keamanan nasional dan mencegah berkembangnya ancaman ekstremisme transnasional di dalam negeri. Pemerintah Anthony Albanese kemudian merespons tekanan tersebut dengan membentuk regulasi keamanan yang lebih ketat, khususnya melalui Schedule 2 yang memperluas kewenangan negara dalam melakukan penyaringan visa terhadap individu asing berdasarkan pertimbangan ideologi, rekam jejak politik, dan potensi ancaman terhadap kohesi sosial. Akan tetapi, kebijakan ini justru memicu kekhawatiran di pihak Israel karena dianggap dapat digunakan secara subjektif untuk membatasi figur-figur politik tertentu yang memiliki pandangan nasionalis dan keras terhadap isu keamanan Timur Tengah. Dalam konteks tersebut, Israel mulai melihat bahwa Australia tidak lagi hanya fokus pada perlindungan keamanan nasionalnya, tetapi juga mulai memasuki arena penilaian politik terhadap aktor pemerintahan negara lain.

Security Dilemma terjadi, niat Australia untuk memproteksi negara dari konflik internal justru memicu tindakan balasan (*tit-for-tat*) yang merusak stabilitas hubungan bilateral kedua negara. Sehingga Penerapan Schedule 2 dalam regulasi baru ini menandai pergeseran fungsi visa dari sekadar izin administratif menjadi instrumen pertahanan ideologi yang agresif. Melalui otoritas absolut Menteri Imigrasi, Australia kini dapat membatalkan atau menolak visa bagi individu yang dianggap memiliki potensi ancaman rasisme atau berpotensi merusak tatanan sosial pasca-Tragedi Bondi. Hukum ini kemudian menjadi titik picu utama gesekan diplomatik dengan Israel, di mana prosedur migrasi berubah menjadi pernyataan politik yang menysar kedaulatan warga negara sekutu,

Kemarahan Israel terhadap Australia muncul sebagai respons langsung atas kebijakan yang dianggap subjektif tersebut. Israel secara terbuka melontarkan kritik keras, bahkan mengecam Perdana Menteri Anthony Albanese melalui Benjamin Netanyahu 2026 dikarenakan Australia dianggap tidak tegas dalam menangani ancaman radikalisme domestik dan justru menysar tokoh-tokoh mereka melalui penyaringan visa dari negara Israel yang telah menjadi mitra diplomatic selama bertahun-tahun. Ketegangan ini memicu mekanisme Tindakan Balasan (*Tit-for-Tat*) yang merupakan ciri khas dari dilema keamanan (Williams, 2003). Israel merespons "ancaman" administratif Australia dengan provokasi diplomatik berupa tawaran pelatihan bagi kepolisian senior Australia, sebuah gestur yang bertujuan merendahkan kapasitas keamanan nasional Canberra. Kritik tajam Netanyahu pada tahun 2026 yang menuding PM Anthony Albanese "diskriminatif" dan "lemah terhadap radikalisme" memperlebar celah ketidakpercayaan. Dengan membalas melalui pengetatan visa bagi diplomat Australia, Israel mencoba menyeimbangkan rasa tidak aman yang diciptakan oleh kebijakan imigrasi Australia, yang pada akhirnya justru merusak stabilitas hubungan bilateral yang telah terjalin lama.

KESIMPULAN

Secara ringkas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan *Combating Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026* oleh pemerintah Australia merupakan bentuk respons negara Australia dalam meningkatnya potensi ancaman ekstremisme pasca tragedi Bondi Beach 2025. Melalui perspektif *security dilemma*, kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat keamanan domestik justru dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, terkhusus Israel. Kebijakan Schedule 2 yang memberikan wewenang kepada pemerintah Australia untuk dilakukan penyaringan dan pembatalan visa yang selektif berbasis pertimbangan ideologis dinilai memiliki implikasi politik dan diplomatic yang luas terhadap hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebijakan keamanan domestik di era globalisasi memiliki dampak yang melampaui batas negara. Upaya Australia dalam mencegah *imported conflict* dan menjaga perpaduan sosial agar dapat memunculkan respons defensive dari Israel, sehingga menciptakan ketegangan diplomatic sebagai bentuk internasional. Keamanan nasional tidak lagi bersifat absolut, melainkan dipengaruhi oleh persepsi dan respons negara lain terhadap Tindakan keamanan yang dilakukan suatu negara. Kesimpulannya, Australia menghadapi tantangan untuk menyeimbangi proteksi keamanan nasional dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan stabilitas hubungan diplomatik. Kebijakan keamanan yang terlalu represif atau dianggap diskriminatif berpotensi untuk memperbesar ketidakpercayaan antarnegara dan mempersulit hubungan internasional di tengah meningkatnya ancaman ekstremisme transnasional.

REFERENSI

- Buzan, Barry., Wæver, Ole., & Wilde, J. de. (1998). *Security: a new framework for analysis*. Lynne Rienner Pub.
- Martin Hobbs, M., Lowe, D., & Holbrook, C. (2025). The Rise of National Security in the 1930s: An Australian Case Study. *Journal of Contemporary History*, 60(1), 3–26. <https://doi.org/10.1177/00220094241303883>
- Mcdonald, M. (2005). Constructing Insecurity: Australian Security Discourse and Policy Post-2001. *International Relations*, 19(3), 297–320. <https://doi.org/10.1177/0047117805055408>
- Den Heijer, M. (2018). Visas and Non-discrimination. *European Journal of Migration and Law*, 20(4), 470–489. <https://doi.org/10.1163/15718166-12340039>
- Williams, M. D. (2003). Words Images Enemies: Securitization and International Politics. *International Studies Quarterly*, Vol. 47, No. 4(4), 511–531. <https://doi.org/https://doi.org/10.1046/j.00208833.2003.00277.x>
- McGarry, J. (2026). Framing Public vs Private Violence: An Inductive Thematic Analysis of The Australian, The Sydney Morning Herald, the Australian Broadcasting Corporation, and The West Australian. *Violence Against Women*, 32(2), 435–463. <https://doi.org/10.1177/10778012241309367>
- Shelvía Arnie Putri, Timbul Dompok, Lubna Salsabila, & Etika Khairina. (2024). Globalization and Non-Traditional Security Challenges in Developing Countries: The Indonesian Case. *Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humanities Innovation*, 1(2), 128–138. <https://doi.org/10.70062/icsshi.v1i2.36>
- Globalization and Non-Traditional Security Challenges in Developing Countries: The Indonesian Case. *Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humanities Innovation*, 1(2), 128–138. <https://doi.org/10.70062/icsshi.v1i2.36>
- Gustafson, S., Barker, J., & Foor, M. (2025). State of Play: Religious Freedom and Security, Extremism, and Terrorism. *The Review of Faith & International Affairs*, 23(4), 76–92. <https://doi.org/10.1080/15570274.2025.2545131>
- Shanaah, S. (2023). Explaining the variation and contestation of P/CVE policies around the world: a public policy approach. *Critical Studies on Terrorism*, 16(3), 475–500. <https://doi.org/10.1080/17539153.2023.2234708>
- Khalil, A. lecturer. Q. I. (2025). Globalization and Extremism: A study of the Impact of Globalization on National Security. *The International and Political Journal*, 62(62), 537–559. <https://doi.org/10.31272/ipj.i62.434>
- Khursheed, S. (2025). Smart Power Dynamics in Pakistan's Counterterrorism Landscape. *Journal of Peace and Diplomacy*, 6(1), 73–90. <https://doi.org/10.59111/JPD.006.01.095>
- Rüegger, S. (2019). Refugees, ethnic power relations, and civil conflict in the country of asylum. *Journal of Peace Research*, 56(1), 42–57. <https://doi.org/10.1177/0022343318812935>
- Łapaj-Kucharska, J. (2023). A long-distance affair: an overview of Australian-Israeli relations. *Israel Affairs*, 29(3), 575–586. <https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2206227>

- Usman, I. A., & Tamunotonye Felix Owubokiri. (2023). International Terrorism in the Age of Information and Communication Technology. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 11(2), 86–99. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v11i2.10516>
- Varela, M., Bulska, D., Bilali, R., & Xu, R. (2025). Does Social Cohesion Predict Justification of Extremist Violence? Evidence From the Sahel Region in Burkina Faso. *European Journal of Social Psychology*, 55(6), 1117–1130. <https://doi.org/10.1002/ejsp.3144>
- Alrasheed, R. A., Al-Shamli, K. A. S., Benabdallah, A. K., Abed Al-Ameri, I. M., & Elshorbagy, N. (2025). The role of identity in a multilevel interdependence in international relations: exploring popular understandings of international politics. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1595969>
- Booth, K., & Wheeler, N. J. (2008). The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics. In *Book Review Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.wiscomp.org/peaceprints.htm>
- ‘After The Bomb: The Securitization of the Norwegian Government Quarters 2011-2021 – Peace Research Institute Oslo (PRIO)’. Accessed 17 April 2026. <https://www.prio.org/comments/757>.
- Cerny, P. G. (n.d.). Terrorism and the New Security Dilemma. In *Naval War College Review* (Vol. 58). Retrieved <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review>
- After The Bomb: The Securitization of the Norwegian Government Quarters 2011-2021 – Peace Research Institute Oslo (PRIO).” Accessed April 17, 2026. <https://www.prio.org/comments/757>.
- Bondi Beach Attack Support Fact Sheets | NSW Government.” Accessed April 17, 2026. <https://www.nsw.gov.au/nsw-government/bondi-beach-attack/bondi-attack-fact-sheets>.
- Israel Offers to Train Senior Australian Police, Scolds PM over ‘Radical Islam’ | News.Com.Au Australia’s Leading News Site for Latest Headlines.” Accessed April 29, 2026. <https://www.news.com.au/national/politics/israel-offers-to-train-senior-australian-police-scolds-pm-over-radical-islam/news-story/6a07c9fbd8705a2bd6ef3e4415dbc02a>.
- Parliament; address Parliament House, Canberra corporateName=Commonwealth. “Chapter Committee Report.” Text. corporateName=Commonwealth Parliament; address=Parliament House, Canberra, ACT, 2600; contact=+61 2 6277 7111. Australia. Accessed April 17, 2026. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/CASHEBILL26/Report/Chapter_1_-_Committee_report.
- Israel Country Brief | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade’. Accessed 12 May 2026. <https://www.dfat.gov.au/geo/israel/israel-country-brief>.
- Graham, D. (2024). *The Jewish population of Australia Key findings from the 2021 Census*. <https://donation.jca.org.au/donation-2.0>